



Oleh
RIKI MARTUSA

■ Analisis

Perombakan Kabinet Berbasis Moral

TUNTUTAN perombakan kabinet oleh berbagai fraksi politik dan masyarakat menjadi kian memanas. Kabinet dianggap tidak mampu lagi menjalankan fungsi roda pemerintahan. Berbagai dugaan kasus korupsi menjangkiti beberapa kementerian. Pertanyaannya, apakah perombakan kabinet dapat menjadi solusi? Kalau ya, perombakan kabinet seperti apa yang harus dilakukan?

Beberapa pendapat menyatakan percuma mengadakan perombakan kabinet. Mau diganti berapa kali pun kalau memang sistemnya korup, akan tetap korup. Menurut saya, tidaklah demikian. Sistem yang korup timbul dari orang-orang yang menjalaninya.

Oleh karena itu, kita perlu memilih orang-orang yang bermoral baik dan tidak korup untuk duduk di kabinet pemerintahan. Jika orang-orang yang

menjalankan sistem pemerintahan adalah orang-orang bermoral baik, sistem yang korup pun bisa diubah menjadi sistem bertanggung jawab.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mendapatkan orang-orang bermoral yang akan menduduki jabatan kabinet mendatang? Jawabannya, pemerintahan perlu menyusun kriteria yang diinginkan untuk kualifikasi seorang menteri pada perombakan kabinet mendatang.

Tentu saja menteri bermoral baik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu integritas, objektivitas, prima, peduli, dan transparansi. Kelima kriteria ini saya anggap cukup mewakili untuk mendapatkan menteri yang cakap dan bermoral baik.

Kriteria pertama menekankan segi integritas. Seorang menteri harus dapat sejalan antara apa yang diucap-

kan untuk dibuat kebijakan dalam mengatur kementeriannya dan apa yang dilakukan pada program kerjanya. Apabila nilai integritas ini ada pada diri seorang menteri, semua program kerja di kementeriannya akan dapat dilakukan dengan baik.

Kriteria kedua menekankan pada segi objektivitas. Seorang menteri harus bersikap jujur dalam menetapkan kebijakan-kebijakan pemerintah dengan tidak memihak golongan atau kelompok tertentu. Walaupun menteri tersebut sebelumnya termasuk dalam fraksi politik tertentu, ketika menjadi menteri, dia haruslah bersikap netral atau tidak memihak dalam membuat kebijakan atau keputusan.

Pada kriteria ketiga, seorang menteri yang prima akan dapat memimpin kementeriannya dengan cakap dan baik karena ia mempunyai ke-

mampuan untuk memimpin dan mengelola kementeriannya. Ia akan terus belajar bagaimana meningkatkan kinerja kementeriannya secara tekun dan terus berusaha mencari terobosan-terobosan baru dalam mengelola bidang kementeriannya sehingga mencapai hasil kinerja terbaik.

Kriteria keempat, seorang menteri yang peduli akan mendapatkan rasa hormat dari karyawan yang dipimpinnya dan mendapatkan dukungan penuh dari karyawannya dalam menjalankan program kerja kementeriannya. Menteri tersebut akan dengan mudah memimpin setiap karyawannya karena ia mempunyai relasi yang baik dengan semua karyawannya.

Kriteria kelima, transparansi merupakan sikap yang mutlak harus dimiliki seorang menteri. Sikap keterbukaan akan meningkatkan kredibilitas

kementerian yang dipimpinnya di mata masyarakat Indonesia. Melalui keterbukaan pula, ia menunjukkan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan kementeriannya kepada masyarakat Indonesia. Pertanggungjawaban yang jelas dan transparan akan memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dengan demikian, perombakan kabinet harus melalui penyeleksian moral melalui lima kriteria tersebut. Jika kita sudah menyeleksi dengan baik untuk para pemimpin negeri ini, semoga negeri kita akan dapat bangkit lagi dan berjaya. ***

Penulis, Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Kristen Maranatha dan pengajar etika bisnis dan profesi. Artikel merupakan pendapat pribadi.